

The Role of Sidorukun Farmers Group through the Food Security Program in Kendalpecabean Village

[Pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Kendalpecabean]

Jovanca Lintang A.Y¹⁾, Hendra Sukmana²⁾

^{1), 2)}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. This study aims to describe and analyze the empowerment of the Sidorukun Farmers Group in enhancing food security in Kendalpecabean Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The study employed a qualitative method with a descriptive approach, purposive sampling, and data collection through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, including data reduction, data display, and drawing conclusions. The theoretical framework applied is Lesnussa's (2019) empowerment theory with five indicators: welfare, access, critical awareness, participation, and control. The results show that welfare improved through the development of irrigation, water gates, pumping houses, and pest control to reduce the risk of crop failure. Access is reflected in the use of land, pumping houses, and irrigation channels, as well as efforts to maintain rice prices and solidarity among members, although human resource capacity development remains limited. Critical awareness is seen in farmers' collective efforts to repair rivers, conduct simultaneous planting, and record planting schedules, albeit with some external guidance. Participation indicates that only a portion of members is active, limiting their involvement in decision-making and long-term planning. Meanwhile, control has begun through the organizational structure of the farmers group, though strategic decisions still depend on the village and agricultural offices. Overall, the empowerment of the Sidorukun Farmers Group is effective in strengthening local food security, although further enhancement of participation and control is needed to achieve sustainable farmer autonomy.

Keywords - Empowerment, Farmers Group, Food Security, Farmer Participation, Infrastructure

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik purposive sampling, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan Lesnussa (2019) dengan lima indikator: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator **kesejahteraan** meningkat melalui pembangunan irigasi, pintu air, rumah pompa, dan pengendalian hama untuk menekan risiko gagal panen. Indikator **akses** tercermin dari pemanfaatan lahan, rumah pompa, dan saluran irigasi, serta upaya menjaga harga gabah dan solidaritas antaranggota, meski pengembangan kapasitas SDM masih terbatas. Indikator **kesadaran kritis** terlihat dari petani melakukan gotong royong memperbaiki sungai, penanaman serentak, dan pencatatan jadwal tanam, meski masih ada dorongan dari pihak eksternal. Indikator **partisipasi** menunjukkan bahwa hanya sebagian anggota yang aktif, sehingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang masih terbatas. Sementara itu, indikator **kontrol** sudah mulai berjalan melalui struktur organisasi Poktan, namun keputusan strategis masih bergantung pada desa dan dinas pertanian. Secara keseluruhan, pemberdayaan Poktan efektif dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, meski masih diperlukan penguatan pada aspek partisipasi dan kontrol untuk mencapai kemandirian petani secara berkelanjutan.

Kata Kunci – Pemberdayaan, Kelompok Tani, Ketahanan Pangan, Partisipasi Petani, Infrastruktur

How to cite: Nama Penulis Pertama, Nama Penulis Kedua (2018) Instructions for Writing and Submit Journal Articles at Muhammadiyah University Sidoarjo 16pt Bold [Petunjuk Penulisan dan Kirim Artikel Jurnal di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 16pt Bold-Title Case]. IJCCD 1 (1). doi: 10.21070/ijccd.v4i1.843

I. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi ukuran kedaulatan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang memadai, bergizi, aman, merata, dan mudah diakses tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga penopang stabilitas ekonomi dan sosial [1], [2]. Di Indonesia, isu ketahanan pangan selalu menjadi agenda strategis karena jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan konsumsi yang terus meningkat, serta ancaman pergeseran iklim yang secara nyata memengaruhi sektor pertanian [3], [4]. Hal tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyebutkan bahwa pemenuhan pangan adalah hak asasi setiap individu dan kewajiban negara untuk memenuhinya secara berkelanjutan [5]–[8].

Meski demikian, menjaga ketahanan pangan nasional bukan perkara mudah. Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi, keterbatasan akses terhadap air, modal, dan teknologi, hingga fluktuasi harga pasar serta ancaman banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem [1], [9], [10]. Kondisi ini dapat menghambat produktivitas petani dan berdampak pada kemampuan mereka dalam mempertahankan ketahanan pangan. Data Kementerian Pertanian mencatat rata-rata alih fungsi lahan berada pada angka 16.000 hektare per tahun dalam kurun 2019–2024, yang mengancam keberlangsungan produksi pangan [11], [12]. Kondisi tersebut sudah diantisipasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menegaskan pentingnya menjaga lahan sawah dari konversi berlebihan, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan [13]. Berdasarkan *Global Food Security Index* (GFSI) 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 113 negara, dengan catatan rendah pada aspek keberlanjutan. GFSI menggunakan empat aspek pokok meliputi keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi dan keamanan makanan (*quality and safety*), serta ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*) [14], [15]. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas petani agar mampu beradaptasi dengan perubahan global sekaligus menjaga kemandirian pangan dalam negeri.

Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional tetap penting meskipun peranannya dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 tercatat lebih rendah dari 12,40% [16]. Menurut IDNFinancials, kontribusi terbesar justru berasal dari sektor manufaktur dan perdagangan [17], [18]. Kendati demikian, hampir sepertiga pekerja Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan [19], [20]. Namun, posisi petani di lapangan sering kali masih rentan, baik terhadap fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses permodalan, maupun keterlambatan adopsi teknologi [21]. Situasi ini menegaskan perlunya langkah pemberdayaan petani agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan juga subjek utama dalam sistem pangan. Kondisi ini mendorong perlunya intervensi kebijakan yang berpihak pada petani [22]. Situasi ini sejalan dengan intruksi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menekankan hak petani atas perlindungan harga, akses sarana produksi, serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan penyuluhan [20], [22]. Untuk mendukung hak tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyediakan ruang bagi pemerintah desa untuk menyalurkan anggaran desa dalam memperkuat sektor pertanian, sehingga desa tidak sekadar penerima kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan berbasis masyarakat [23], [24]. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi kunci membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan [25], [26].

Realitas serupa terlihat di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang menghadapi tantangan wilayah agraris seperti lahan sawah rawan banjir, infrastruktur irigasi yang membutuhkan perbaikan, serta ancaman hama yang berulang menurunkan produktivitas pertanian [2]. Kondisi ini menunjukkan pentingnya keberadaan kelompok tani sebagai kelembagaan yang tidak hanya menjadi wadah administrasi, tetapi juga sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan daya saing petani dalam mengambil keputusan strategis atas usaha taninya [27]–[29]. Pemberdayaan adalah proses memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kepada masyarakat agar lebih mandiri dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya [9], [30].

Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan pendamping lapangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sendiri [1]. Menurut Lesnussa (2019), pemberdayaan mencakup lima aspek utama: (1) kesejahteraan, (2) akses, (3) kesadaran kritis, (4) partisipasi, dan (5) kontrol. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan menegaskan bahwa kelompok tani berperan dalam mengoptimalkan kemampuan anggotanya, memperluas akses informasi, dan memperkuat kerjasama dalam mengelola usaha tani [31]. Pemberdayaan ini dilakukan melalui berbagai upaya, termasuk pelatihan dan penyuluhan teknis agar petani memperoleh keterampilan baru, mengadopsi teknologi modern, serta meningkatkan produktivitas [22], [32], [33]. Melalui pengorganisasian yang solid, kelompok tani berperan sebagai sarana kerjasama bagi petani, pemerintah desa, serta mitra eksternal untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan pendekatan ini, kelompok tani berperan sebagai motor penggerak ketahanan pangan lokal sekaligus pilar penting dalam mewujudkan pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan [34], [35].

Data demografis menunjukkan Poktan Sidorukun 1 beranggotakan 35 orang dan Poktan Sidorukun 2 sebanyak 25 orang, dengan total luas sawah sekitar 74 hektare. Mayoritas petani adalah buruh sewa, bukan pemilik sawah, dan Kendal Cabe memiliki potensi panen dua kali setahun. Poktan Sidorukun 1 terlihat lebih aktif memanfaatkan peluang ini dibanding Poktan Sidorukun 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program kelompok tani sangat tergantung pada partisipasi aktif anggotanya serta kemampuan memanfaatkan potensi lahan yang ada. Di tengah kondisi ini, Kelompok Tani Sidorukun di Desa Kendalpecabean menampilkan peranan strategis kelembagaan dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Bersama pemerintah desa, kelompok tani melaksanakan berbagai program yang saling mendukung. Program-program tersebut fokus pada pengelolaan air dan pengendalian hama, yang menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pertanian serta peningkatan produktivitas lahan. Selain menjalankan program infrastruktur dan pengendalian hama, Kelompok Tani Sidorukun juga menyalurkan modal usaha dan melakukan proses pengolahan produk anggota.

Upaya ini memperlihatkan bahwa kelompok tani sidorukun tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya pertanian, tetapi juga sebagai fasilitator ekonomi yang mendukung kesejahteraan anggotanya secara menyeluruh [24], [31]. Langkah-langkah ini konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan penyediaan sarana pendukung bagi petani [20]. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pembangunan saluran irigasi dan pintu air pada tahun 2022–2024, yang kemudian didukung dengan normalisasi saluran irigasi pada 2023–2024. Kedua program ini memastikan distribusi air dapat berjalan lancar dan merata hingga ke lahan sawah yang berada di hilir. Dengan adanya saluran yang lebih teratur, risiko kekeringan maupun kelebihan air dapat diminimalkan sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga.

Selain itu, pada tahun 2023 kelompok tani Sidorukun ini juga membangun rumah pompa sebagai solusi ketika debit air irigasi tidak mencukupi. Fasilitas ini memungkinkan lahan-lahan yang sulit teraliri air dapat kembali produktif. Kehadiran rumah pompa memperlihatkan kemampuan kelompok tani dalam mengadaptasi kondisi lapangan dengan inovasi teknis yang sederhana namun berdampak besar. Untuk menjaga hasil panen, Poktan Sidorukun juga melaksanakan program pengumpanan hama tikus pada 2022–2023. Serangan tikus sering kali menjadi ancaman serius bagi petani, sehingga pengendalian dilakukan secara kolektif agar lebih efektif. Dengan adanya program ini, kerugian akibat gagal panen dapat ditekan, sekaligus memperkuat rasa gotong royong antaranggota kelompok.

Selain itu, kelompok tani juga memperoleh dukungan berupa bantuan bibit unggul dan pupuk dari dinas pertanian, pihak swasta, maupun melalui subsidi pupuk dari pemerintah. Walaupun bantuan ini tidak selalu rutin setiap tahun, keberadaannya tetap sangat membantu petani dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil pertanian. Rangkaian program yang dijalankan Poktan Sidorukun menunjukkan bahwa setiap upaya berperan utama dalam memperkuat ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean. Dengan demikian, pengalaman Poktan Sidorukun memperlihatkan bahwa ketahanan pangan nasional sejatinya bertumpu pada kekuatan komunitas lokal yang berdaya dan mandiri. Adapun rangkaian program yang dijalankan oleh Poktan Sidorukun tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Program Pemberdayaan Poktan Sidorukun di Desa Kendalpecabean Tahun 2022-2024

No.	Nama Program	Tahun
1	Pembangunan saluran irigasi dan pintu air	2022-2024
2	Pembuatan rumah pompa	2023
3	Pengumpanan hama tikus	2022-2023
4	Normalisasi saluran air irigasi	2023-2024

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi (2025)

Merujuk pada Tabel 1 di atas, dapat dipahami bahwasanya bila dikaji dari 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 hingga 2024, program yang dijalankan Kelompok Tani Sidorukun masih tetap berfokus pada penguatan infrastruktur pertanian dan pengendalian hama. Pada tahun 2022 tercatat telah dilaksanakan pembangunan saluran irigasi dan pintu air, serta program pengumpanan hama tikus. Pada tahun 2023 tercatat adanya tambahan program berupa pembuatan rumah pompa, di samping keberlanjutan pembangunan saluran irigasi dan pengumpanan hama tikus, serta dimulainya normalisasi saluran air irigasi. Sedangkan pada tahun 2024, program yang berjalan berfokus pada penyelesaian pembangunan saluran irigasi dan pintu air serta keberlanjutan normalisasi saluran irigasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya di Desa Kendalpecabean perhatian utama Kelompok Tani Sidorukun terletak pada perbaikan dan penyediaan sarana pengelolaan air untuk pertanian yang dijalankan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun, diiringi dengan upaya kolektif dalam pengendalian hama. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator kebutuhan dasar petani terhadap air dan perlindungan tanaman masih menjadi prioritas penting dan program yang dilaksanakan mampu mendukung peningkatan ketahanan pangan masyarakat desa.

Meskipun berbagai program pemberdayaan yang dijalankan Kelompok Tani Sidorukun dalam tiga tahun terakhir telah berfokus pada pembangunan infrastruktur air dan pengendalian hama, kenyataannya program tersebut belum mampu menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi petani. Upaya perbaikan irigasi dan normalisasi saluran air belum sepenuhnya menjawab keterbatasan akses petani terhadap informasi, teknologi, dan pelatihan yang seharusnya mendukung peningkatan kapasitas budidaya. Di sisi lain, banjir yang terus terjadi dan menyebabkan gagal panen menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak terkait masih lemah, sehingga program fisik yang dilaksanakan tidak diiringi dengan konsolidasi kelembagaan yang memadai. Selain itu, rendahnya kesejahteraan petani membuat mereka sulit terlibat aktif dalam program maupun mengambil keputusan penting terkait pengelolaan usaha tani. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara program yang telah dilaksanakan dengan kebutuhan nyata petani, sehingga tujuan pemberdayaan untuk meningkatkan ketahanan pangan desa belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan beberapa masalah utama dalam pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun di Desa Kendalpecabean. Permasalahan pertama yang muncul adalah keterbatasan akses yang dialami para petani, baik dalam hal akses terhadap informasi pertanian, teknologi, maupun dukungan pelatihan yang relevan. Kondisi ini membuat petani kesulitan meningkatkan kemampuan budidaya sehingga risiko gagal panen tetap tinggi. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung seperti saluran irigasi juga belum optimal, yang semakin memperburuk produktivitas pertanian di Desa Kendalpecabean. Manfaat program pemberdayaan yang belum dirasakan secara merata oleh seluruh anggota juga memperlemah akses pengetahuan dan motivasi petani untuk terlibat aktif, sehingga kesenjangan kapasitas antar anggota masih terlihat. Masalah kedua berkaitan dengan koordinasi antar pihak terkait yang masih lemah. Minimnya sinergi antara kelompok tani, pemerintah desa, penyuluh pertanian, dan lembaga pendukung lainnya menyebabkan berbagai program dan penanganan masalah, termasuk persoalan banjir, tidak dapat diatasi secara efektif. Banjir yang berulang dan tidak tertangani secara memadai inilah yang kemudian memicu gagal panen pada sejumlah lahan, karena tidak adanya langkah mitigasi yang benar-benar terkoordinasi. Lemahnya koordinasi juga berdampak pada keterlambatan respons ketika masalah muncul, sehingga upaya pemberdayaan tidak berjalan optimal. Masalah ketiga adalah kesejahteraan petani yang masih rendah, yang berpengaruh langsung pada kemampuan mereka untuk mengakses sarana produksi, memperbaiki infrastruktur, atau mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Kesejahteraan yang belum memadai membuat petani lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan harian daripada investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan. Kondisi ini menjadi penghambat penting dalam upaya pemberdayaan, karena proses pemberdayaan membutuhkan dukungan ekonomi dan stabilitas pendapatan sebagai fondasi untuk berkembang.

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya mendukung pentingnya pemberdayaan kelompok tani dalam memperkuat ketahanan pangan lokal secara berkelanjutan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alaia dan Darto (2024) dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Tani dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Lokal secara Berkelanjutan di Desa Ciwangi”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji keberhasilan pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan kemandirian petani serta akses terhadap sumber daya yang mendukung keberlanjutan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kelompok tani di Desa Ciwangi melalui dimensi *enabling*, *empowering*, dan *protecting* memiliki peran signifikan dalam memajukan sektor pertanian. Dimensi *enabling* mencakup penyediaan sumber daya dan sarana pendukung, *empowering* menekankan peningkatan kemandirian individu maupun kelompok, sedangkan *protecting* bertujuan melindungi kelompok dari risiko dan ancaman usaha tani. Integrasi ketiga dimensi ini memberikan fondasi yang kokoh bagi keberlanjutan pertanian. Dukungan sinergis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lokal, memperkuat kapasitas kelompok untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi sekaligus mempertahankan kearifan lokal. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi pengembangan model pemberdayaan kelompok tani yang holistik, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah lain [24].

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Selli, dkk (2025) dengan judul “Pemberdayaan Petani Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Sungai Dua Indah”. Penelitian ini bertujuan guna meneliti peran pemberdayaan petani padi untuk memperkuat ketahanan pangan serta aspek-aspek yang mempengaruhinya di Desa Sungai Dua Indah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberdayaan petani padi di desa tersebut berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya serta dukungan regulasi yang belum konsisten. Faktor-faktor pendukung berupa pelatihan, ketersediaan benih dan pupuk berkualitas, serta infrastruktur pertanian yang memadai membantu memperkuat kapasitas petani secara berkelanjutan. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi pengembangan model pemberdayaan pertanian di wilayah lain [33].

Ketiga, Penelitian Kristiani Nindi, dkk (2024) dengan judul “Peran Kelompok Tani dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Lumbung Pangan Desa Kamubheka Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende)”. Menunjukkan bahwa kelompok tani di Desa Kamubheka berperan krusial dalam memperkuat ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pengelolaan lumbung pangan, penyediaan akses pangan, dan dukungan terhadap anggota. Lumbung pangan ini membantu menjaga ketersediaan pangan bahkan saat produksi menurun atau terjadi

bencana. Namun, pemberdayaan kelompok tani masih menghadapi kendala, seperti manajemen yang belum sepenuhnya transparan, keterbatasan sumber daya, dan partisipasi anggota yang tidak merata. Strategi pengelolaan hutang yang diterapkan membantu kestabilan ekonomi anggota, meskipun implementasinya terkadang kurang konsisten. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan pemerintah desa dan pelatihan berkala untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas kelompok tani [36].

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pemberdayaan dari Lesnussa (2019) yaitu: Kesejahteraan, Akses, Kesadaran kritis, Partisipasi, dan Kontrol.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun untuk memperkuat ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian dipilih di Desa Kendalpecabean karena desa ini menghadapi permasalahan agraris seperti kerentanan banjir, kebutuhan perbaikan infrastruktur irigasi, serta serangan hama, yang menuntut adanya pemberdayaan kelompok tani sebagai solusi. Fokus penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan Lesnussa (2019) yang menjadi kunci analisis dalam mengkaji proses pemberdayaan kelompok tani. Teori ini menjelaskan bahwa pemberdayaan mencakup lima indikator utama, yaitu: (1) **Kesejahteraan**: terpenuhinya kebutuhan dasar agar hidup aman dan tentram. (2) **Akses**: kemampuan memanfaatkan program dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas. (3) **Kesadaran Kritis**: pemahaman bahwa ketimpangan sosial bisa diubah. (4) **Partisipasi**: keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. (5) **Kontrol**: semua lapisan masyarakat ikut mengelola sumber daya secara adil dan transparan. Informan dipilih melalui teknik purposive sampling, terdiri dari, Ketua Kelompok Tani Sidorukun I, Ketua Kelompok Tani Sidorukun II, Bendahara Desa, serta Sekretaris Desa Kendalpecabean. Data penelitian terbagi menjadi data primer dan sekunder, yang kemudian data dikumpulkan melalui observasi, wawancara intensif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (1984) meliputi empat tahap: (1) pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan langsung di lapangan; (2) reduksi data dengan menyaring, mengelompokkan, dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan agar data menjadi lebih fokus; (3) penyajian data dalam bentuk naratif maupun visual seperti tabel atau grafik yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman; dan (4) penarikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penyajian data dan diuji kembali dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2016)., disertai triangulasi untuk memastikan keabsahan informasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya agar dapat mengambil keputusan penting bagi kehidupannya. Dalam pertanian, pemberdayaan kelompok tani menjadi strategi untuk memperkuat posisi petani, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan ketahanan pangan berkelanjutan. Penelitian ini membahas pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun menggunakan teori Lesnussa (2019) dengan lima indikator: Kesejahteraan, Akses, Kesadaran Kritis, Partisipasi, dan Kontrol. Indikator ini digunakan untuk menganalisis peran Poktan Sidorukun dalam praktik sehari-hari dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean.

A. Kesejahteraan

Menurut Lesnussa (2019), kesejahteraan adalah kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk pangan, sandang, papan, air bersih, pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan layak. Kesejahteraan tidak semata-mata dinilai dari penghasilan, melainkan juga dari kualitas hidup, rasa aman, dan kemampuan menghadapi risiko seperti gagal panen atau bencana alam. Dalam konteks pemberdayaan Poktan, kesejahteraan petani dipengaruhi oleh kemampuan mereka memperoleh hasil panen yang stabil, akses terhadap sarana produksi, dan intervensi pemerintah yang meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan desa. Di Desa Kendalpecabean, kesejahteraan petani masih menghadapi kendala utama berupa banjir, hama tikus, dan keterbatasan infrastruktur irigasi. Sebelum adanya pembangunan saluran irigasi, pintu air, dan rumah pompa, petani sering mengalami gagal panen, terutama di musim penghujan. Bantuan berupa bibit atau pupuk bersubsidi belum rutin, sehingga petani tetap tergantung pada sumber daya eksternal. Namun, alokasi dana desa untuk program infrastruktur mulai memberikan harapan bagi peningkatan hasil panen dan pendapatan petani.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutrisno selaku Ketua Poktan Sidorukun I Desa Kendalpecabean sebagai berikut:

“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya pembangunan saluran irigasi dan pintu air ini, karena sebelumnya sawah kami hampir setiap musim hujan selalu terendam banjir, sehingga banyak padi yang gagal panen. Sekarang meskipun hujan deras atau air sungai meluap, sawah tetap bisa ditanami dan dipanen walau hasilnya belum maksimal. Kami merasa dengan adanya fasilitas ini, setidaknya kami bisa mengurangi risiko gagal panen dan lebih tenang dalam mengelola lahan pertanian.” (Wawancara, 15 Juli 2025).

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Mistar selaku Ketua Poktan Sidorukun II:

“Pengumpanan hama tikus sangat membantu mengurangi kerugian yang selama ini sering kami alami. Memang tidak sepenuhnya menutup kerugian karena terkadang jumlah tikus masih cukup banyak, tapi setidaknya dengan cara ini, sebagian padi kami bisa terselamatkan. Kami merasa lebih tenang karena ada upaya yang konkret untuk melindungi tanaman kami. Tanpa pengumpanan ini, kemungkinan gagal panen akan lebih tinggi, apalagi di musim penghujan atau saat padi mulai matang. Dengan normalisasi saluran air dan pembuatan pintu air, biaya produksi sedikit berkurang karena sawah menjadi lebih mudah diolah dan pengairan lebih teratur. Dulu, kami harus menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuka saluran air yang tersumbat atau mengatasi genangan yang mengganggu proses tanam. Sekarang, walaupun hasil panen belum maksimal, proses bercocok tanam menjadi lebih efisien dan risiko gagal panen bisa ditekan. Kami berharap ke depan, sistem irigasi ini terus diperbaiki sehingga kualitas dan kuantitas hasil panen semakin meningkat.” (Wawancara, 15 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para petani Poktan Sidorukun I dan II, dapat disimpulkan bahwa pembangunan saluran irigasi dan pintu air memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan lahan dan ketahanan panen padi. Fasilitas ini membantu mengurangi risiko gagal panen akibat banjir saat musim hujan, sehingga petani lebih tenang dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pertanian. Selain itu, pengumpanan hama tikus turut berperan dalam mengurangi kerugian meskipun tidak sepenuhnya menutupinya. Normalisasi saluran air juga menurunkan biaya produksi karena lahan lebih mudah diolah dan pengairan lebih teratur. Secara keseluruhan, intervensi tersebut meningkatkan efisiensi kerja petani dan memberikan perlindungan terhadap risiko pertanian, meskipun hasil panen belum optimal. Dengan perbaikan dan pemeliharaan berkelanjutan, diharapkan kualitas dan kuantitas produksi padi dapat meningkat di masa mendatang. Selain upaya dari petani sendiri dalam mengelola lahan dan mengurangi risiko gagal panen, peran pemerintah desa juga sangat penting. Salah satunya melalui alokasi dana desa yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi, pintu air, dan rumah pompa, yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan tanam dan panen meskipun menghadapi musim hujan

Pak Junaidi selaku Bendahara desa menjelaskan:

“Dana desa lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur karena hal ini dianggap sebagai prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang petani. Infrastruktur yang baik, seperti saluran irigasi, pintu air, dan rumah pompa, akan memastikan sawah dapat ditanami dan dipanen meskipun menghadapi musim hujan dengan intensitas tinggi. Dengan fokus pada pembangunan ini, diharapkan risiko gagal panen bisa ditekan, dan petani tidak lagi mengalami kerugian besar akibat genangan air atau gangguan pengairan. Alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur, termasuk rumah pompa, merupakan langkah nyata yang kami ambil agar petani tetap bisa panen meskipun hujan tinggi atau air sungai meluap. Kami menyadari bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, upaya tanam dan panen petani bisa terganggu, bahkan menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan ini juga didukung dengan koordinasi bersama para petani dan perangkat desa untuk memastikan hasilnya tepat sasaran dan benar-benar membantu aktivitas pertanian sehari-hari.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Dari wawancara dengan Pak Junaidi, dapat disimpulkan bahwa fokus dana desa pada pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi, pintu air, dan rumah pompa sangat membantu petani dalam menekan risiko gagal panen dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Koordinasi antara desa dan petani juga memastikan dana digunakan tepat sasaran. Selanjutnya, tabel berikut menunjukkan rincian bantuan program infrastruktur yang telah diterima petani.

Tabel 2. Anggaran Program Pemberdayaan Poktan Sidorukun di Desa Kendalpecabean Tahun 2022-2024

No	Nama Program	Penerima Manfaat	2022 (Rp)	Persen	2023 (Rp)	Persen	2024 (Rp)	Persen
01	Pembangunan saluran irigasi & pintu air	Petani	67.000.000	53,17%	209.000.000	76,28%	242.000.000	84,32%
02	Pembuatan rumah pompa	Petani	25.000.000	19,84%	25.000.000	9,12%	25.000.000	8,71%
03	Pengumpanan hama tikus	Petani	14.000.000	11,11%	20.000.000	7,30%	–	0%
04	Normalisasi saluran air irigasi	Petani	20.000.000	15,87%	20.000.000	7,30%	20.000.000	6,97%
JUMLAH PER TAHUN			126.000.000	100%	274.000.000	100%	287.000.000	100%

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi (2025)

Berdasarkan Tabel 2. di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan anggaran pembangunan saluran irigasi dan pintu air dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya pergeseran prioritas kebijakan desa yang semakin berfokus pada penguatan infrastruktur pengairan sebagai strategi utama dalam mendukung ketahanan pangan. Pada tahun 2022, alokasi anggaran masih berada pada tahap awal pembangunan dengan nilai Rp67.000.000 atau 53,17% dari total anggaran. Memasuki tahun 2023, anggaran meningkat signifikan menjadi Rp209.000.000 atau 76,28%, yang menunjukkan adanya perluasan dan penguatan konstruksi saluran irigasi. Pada tahun 2024, anggaran kembali meningkat menjadi Rp242.000.000 atau 84,32%, yang mengindikasikan tahap penyempurnaan dan optimalisasi sistem pengairan. Kenaikan ini dapat dipahami karena irigasi merupakan faktor fundamental dalam sistem pertanian, khususnya di desa yang memiliki risiko banjir dan potensi gagal panen. Infrastruktur pengairan yang baik berdampak langsung terhadap stabilitas musim tanam, pengendalian debit air, serta peningkatan produktivitas lahan. Oleh karena itu, pemerintah desa cenderung mengalokasikan anggaran yang lebih besar setiap tahunnya pada program ini karena dianggap sebagai solusi jangka panjang yang memiliki dampak paling signifikan terhadap peningkatan hasil pertanian dan keberlanjutan ketahanan pangan.

Program pembuatan rumah pompa dialokasikan sebesar Rp25.000.000 setiap tahun pada periode 2022 hingga 2024. Meskipun secara persentase mengalami penurunan dari 19,84% pada tahun 2022 menjadi 9,12% pada tahun 2023 dan 8,71% pada tahun 2024, penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan total anggaran desa secara keseluruhan, bukan karena adanya pengurangan nominal pada program ini. Pembangunan rumah pompa dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahun 2022 dilakukan pembangunan tahap pertama yang mencakup konstruksi bangunan dan instalasi awal. Selanjutnya pada tahun 2023 dilaksanakan tahap kedua berupa penyempurnaan konstruksi dan penguatan fungsi operasional. Pada tahun 2024, alokasi anggaran tetap dipertahankan untuk mendukung keberlanjutan fungsi rumah pompa melalui kegiatan pemeliharaan dan operasional. Konsistensi anggaran tersebut menunjukkan bahwa program ini bersifat stabil dan terencana, serta berfungsi sebagai sarana pendukung sistem pengairan. Peningkatan anggaran desa lebih diprioritaskan pada pembangunan saluran irigasi yang memiliki cakupan dampak lebih luas terhadap stabilitas produksi pertanian.

Program pengumpanan hama tikus mengalami peningkatan anggaran dari Rp14.000.000 (11,11%) pada tahun 2022 menjadi Rp20.000.000 (7,30%) pada tahun 2023. Kenaikan nominal ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut terjadi peningkatan intensitas atau kebutuhan pengendalian hama. Secara kontekstual, hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya serangan tikus yang berpotensi mengganggu hasil panen, sehingga desa merasa perlu memperkuat upaya pengendalian melalui penambahan jumlah umpan atau perluasan area penanganan. Namun pada tahun 2024, program ini tidak lagi dianggarkan (0%). Penghentian anggaran dapat menunjukkan beberapa kemungkinan. Pertama, pengendalian hama pada tahun sebelumnya dinilai cukup efektif sehingga tidak memerlukan alokasi lanjutan. Kedua, pendekatan penanganan hama dialihkan ke metode lain yang lebih kolektif dan berkelanjutan, seperti tanam serentak atau perbaikan sistem irigasi yang secara tidak langsung menekan populasi hama. Ketiga, adanya pergeseran prioritas anggaran ke pembangunan infrastruktur pengairan yang dianggap memiliki dampak jangka panjang lebih besar terhadap stabilitas produksi pertanian. Secara kebijakan, pola ini menunjukkan bahwa program pengumpanan hama bersifat responsif dan situasional, bukan program prioritas jangka panjang. Ketika kondisi hama meningkat, anggaran ditambah; ketika kondisi dianggap terkendali atau strategi berubah, anggaran dihentikan dan dialihkan ke program yang dinilai lebih strategis.

Program normalisasi saluran air irigasi menunjukkan alokasi anggaran yang tetap sebesar Rp20.000.000 setiap tahun dari 2022 hingga 2024. Meskipun secara persentase terlihat menurun (15,87% pada 2022, 7,30% pada 2023, dan 6,97% pada 2024), penurunan tersebut terjadi karena total anggaran desa meningkat, bukan karena pengurangan

nominal program. Konsistensi anggaran ini menunjukkan bahwa normalisasi saluran irigasi merupakan kegiatan rutin tahunan. Normalisasi biasanya mencakup pembersihan sedimentasi, pengangkatan lumpur, perapian tebing saluran, serta pembersihan sampah atau gulma yang menghambat aliran air. Kegiatan ini memang perlu dilakukan secara berkala agar sistem irigasi tetap berfungsi optimal dan tidak menyebabkan genangan atau penyumbatan yang dapat memicu banjir. Karena sifatnya pemeliharaan berkala dan bukan pembangunan baru, kebutuhan biayanya relatif stabil dari tahun ke tahun. Pemerintah desa kemungkinan telah memiliki estimasi standar biaya untuk kegiatan tersebut, sehingga alokasinya dibuat tetap sebagai bagian dari perencanaan rutin. Stabilitasnya anggaran ini menunjukkan bahwa normalisasi berperan sebagai program pendukung yang menjaga keberlanjutan fungsi irigasi, sementara peningkatan anggaran difokuskan pada pembangunan saluran baru yang bersifat ekspansif dan prioritas strategis.

Berdasarkan tabel tersebut, total anggaran per tahun mengalami peningkatan dari Rp126.000.000 pada tahun 2022 menjadi Rp274.000.000 pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi Rp287.000.000 pada tahun 2024. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya penguatan komitmen desa dalam mendukung sektor pertanian melalui peningkatan belanja program. Peningkatan total anggaran tersebut terutama didominasi oleh pembangunan saluran irigasi dan pintu air yang setiap tahun menyerap persentase terbesar. Besarnya alokasi anggaran pada pembangunan saluran irigasi dan pintu air menunjukkan bahwa desa menempatkan penguatan infrastruktur pengairan sebagai prioritas utama dalam mendukung sektor pertanian. Irigasi menjadi fokus karena merupakan faktor penentu stabilitas produksi, terutama pada wilayah yang rawan banjir dan berisiko gagal panen. Melalui perbaikan dan perluasan saluran irigasi, kelompok tani memperoleh akses air yang lebih terjamin, jadwal tanam menjadi lebih teratur, serta potensi kerugian dapat ditekan. Sementara itu, program rumah pompa dan normalisasi saluran berfungsi sebagai pendukung yang menjaga keberlanjutan sistem, dan pengendalian hama bersifat situasional. Dengan demikian, dominasi anggaran pada infrastruktur menunjukkan bahwa penguatan sarana produksi menjadi fondasi penting dalam mendukung kapasitas dan kemandirian kelompok tani secara berkelanjutan.

Berdasarkan teori Lesnussa (2019), kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program infrastruktur dan pengendalian hama di Desa Kendalpecabean menandakan bahwa pemerintah desa berusaha memajukan kesejahteraan petani melalui pemberdayaan Poktan. Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Selli, dkk (2025), yang menyatakan bahwa pemberdayaan petani padi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, dengan dukungan pelatihan, akses benih dan pupuk berkualitas, serta infrastruktur pertanian yang memadai. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Desa Kendalpecabean, di mana pembangunan saluran irigasi, pintu air, dan rumah pompa membantu mengurangi risiko gagal panen, menurunkan biaya produksi, dan memperkuat kemandirian petani. Dengan demikian, integrasi program pemerintah desa dan pemberdayaan Poktan terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan petani, sesuai teori dan praktik yang sudah dibuktikan pada penelitian terdahulu (Selli et al., 2025).

B. Akses

Akses dalam pemberdayaan mencerminkan kemampuan individu maupun kelompok untuk memanfaatkan program, layanan, dan sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kapasitas, mengatasi berbagai persoalan, serta memperbaiki kualitas hidup. Ketika akses ini terbatas, proses peningkatan kesejahteraan pun terhambat. Kesenjangan sosial turut memperlebar perbedaan kesempatan dalam memperoleh sumber daya, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah. Sumber daya tersebut mencakup waktu, tenaga, lahan, informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Di desa Kendalpecabean, petani memanfaatkan waktu dan tenaga secara optimal dalam siklus tanam dan panen yang berlangsung dua kali setahun. Poktan Sidorukun berperan aktif mengoordinasikan anggotanya untuk memastikan kegiatan pertanian berjalan lancar. Selain itu, Poktan Sidorukun juga menjaga stabilitas harga gabah demi melindungi petani dari kerugian akibat fluktuasi pasar.

Menurut Bapak Sutrisno selaku Ketua Poktan Sidorukun I, upaya menjaga harga gabah dilakukan melalui koordinasi dengan tengkulak dan pembeli:

“Kami di kelompok tani juga berusaha menjaga supaya harga gabah tetap stabil, supaya petani tidak rugi saat musim panen raya. Biasanya kalau panen serentak, stok gabah yang melimpah bikin harga turun drastis. Untuk itu, kami berkoordinasi dengan tengkulak dan pembeli agar harga tetap wajar. Walaupun tidak selalu berhasil sesuai harapan, tapi setidaknya langkah ini bisa membantu petani menutup biaya produksi dan masih mendapat keuntungan.” (Wawancara, 17 Juli 2025)

Berdasarkan pemaparan informan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya kelompok tani dalam menjaga stabilitas harga gabah sangat penting untuk melindungi petani dari kerugian saat panen raya. Melalui koordinasi dengan tengkulak dan pembeli, harga gabah diusahakan tetap wajar sehingga petani dapat menutup biaya produksi sekaligus memperoleh keuntungan, meskipun hasilnya belum selalu maksimal. Hal ini menunjukkan adanya peran kelompok tani dalam mengendalikan pasar lokal demi menjaga kesejahteraan anggotanya. Selain menjaga harga, Poktan menekankan prinsip solidaritas dan kebersamaan. Gotong royong dalam mengatasi kendala tanam maupun

panen, serta keadilan dalam pembagian bantuan, memperlihatkan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya mengandalkan pada hasil panen, melainkan juga pada kekuatan kebersamaan antar anggota. Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Mistar selaku Ketua Poktan Sidorukun II, yang menegaskan pentingnya keadilan dan solidaritas antar anggota kelompok:

“Selain soal harga, kami juga mengutamakan keadilan dan kebersamaan antar anggota kelompok tani. Kalau ada yang kesulitan saat musim tanam atau panen, misalnya kekurangan tenaga kerja atau peralatan, anggota lain biasanya turun tangan untuk membantu. Begitu juga dalam pembagian bantuan, kami usahakan adil biar tidak ada yang merasa dirugikan. Solidaritas ini penting, karena kalau satu petani jatuh, dampaknya bisa terasa ke semuanya. Dengan begitu, kami berharap kesejahteraan bersama bisa lebih terjaga, bukan hanya hasil panen semata.” (Wawancara, 17 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kebersamaan dan solidaritas menjadi fondasi penting dalam keberlangsungan kelompok tani. Prinsip keadilan dalam pembagian bantuan, serta semangat gotong royong saat menghadapi kendala tanam maupun panen, menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh kekuatan kebersamaan antar anggota. Hal ini membuktikan bahwa kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai wadah produksi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat hubungan antar petani. Selain didukung oleh solidaritas sosial dan kebersamaan antar anggota, keberhasilan kelompok tani juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya fisik yang menunjang kegiatan pertanian. Tabel berikut menggambarkan kondisi sumber daya pertanian di Desa Kendalpecabean:

Tabel 3. Sumber Daya Pertanian Desa Kendalpecabean

Jenis Sumber Daya	Jumlah / Kondisi	Keterangan
Lahan Sawah	74 ha	Dibagi dalam 2 kelompok tani
Rumah Pompa	2 unit	Digunakan untuk irigasi sawah
Saluran Irigasi	13,45 km	Menjangkau seluruh sawah

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi (2025)

Berdasarkan tabel 3. di atas, Desa Kendalpecabean memiliki sumber daya pertanian yang memadai untuk mendukung produksi padi. Lahan seluas 74 hektar yang dikelola dalam 2 kelompok tani menjadi aset utama bagi ekonomi petani. Keberadaan 2 unit rumah pompa serta saluran irigasi sepanjang 13,45 km semakin memperkuat infrastruktur pertanian di desa ini. Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan lahan yang didukung sarana pengairan memadai menjadi faktor penting bagi keberlanjutan usaha tani padi. Dengan kondisi tersebut, Desa Kendalpecabean tergolong strategis dalam pengembangan pertanian, khususnya padi. Lahan sawah yang mengelilingi desa memberi peluang besar bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Berikut merupakan salah satu lahan sawah yang ada di Desa Kendalpecabean sebagai berikut:



Gambar 1. Dokumentasi Lahan Sawah di Desa Kendalpecabean
Sumber: Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean (2025)

Berdasarkan Gambar 1 di atas, terlihat lahan sawah Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kendalpecabean yang sedang memasuki masa panen pada periode penelitian tahun 2024 dan digarap oleh petani penggarap sebagai bagian dari pemanfaatan aset desa untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lahan tersebut dikelola oleh kelompok tani dengan dukungan sarana irigasi dan rumah pompa sehingga ketersediaan air dapat terjaga sepanjang musim tanam. Pemanfaatan sawah TKD ini bertujuan memberikan akses kepada petani penggarap terhadap lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Selain itu, pengelolaan lahan secara terorganisir memungkinkan pemanfaatan waktu, tenaga, dan sumber daya secara lebih efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya pertanian di Desa Kendalpecabean tergolong memadai.

Meskipun akses terhadap sumber daya fisik tergolong memadai, pemberdayaan petani di Desa Kendalpecabean belum sepenuhnya menyentuh aspek pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri. Penguatan hard skill, seperti penguasaan teknologi pertanian modern dan manajemen usaha tani, serta soft skill, seperti kemampuan komunikasi, kerja sama, dan pengambilan keputusan, masih relatif terbatas. Selain itu, aspek self development yang berkaitan dengan motivasi, kemandirian, dan daya adaptasi petani terhadap perubahan juga belum menjadi perhatian utama dalam program pemberdayaan.

Selama ini, kegiatan pendampingan yang berasal dari Kecamatan Candi, dinas terkait, maupun pihak swasta umumnya masih terbatas pada bentuk penyuluhan, seperti penyuluhan penggunaan pestisida, pengendalian hama, serta penanganan banjir dan gangguan lingkungan. Kegiatan tersebut belum diarahkan pada pelatihan yang bersifat aplikatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun manajerial petani. Akibatnya, meskipun petani telah memiliki akses yang baik terhadap sarana produksi, kemampuan mereka dalam mengelola usaha tani secara inovatif dan mandiri masih belum berkembang secara optimal.

Kondisi ini sejalan dengan teori Lesnussa (2019) yang menegaskan bahwa akses terhadap sumber daya merupakan faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan. Temuan ini juga mendukung penelitian Selfi, dkk (2025) di Desa Sungai Dua Indah, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan petani padi berperan penting bagi ketahanan pangan meskipun masih terkendala akses dan dukungan kebijakan. Dengan demikian, indikator akses di Desa Kendalpecabean menunjukkan bahwa petani telah memanfaatkan sarana dan prasarana pertanian secara efektif untuk mendukung produksi dan keberlanjutan ekonomi lokal. Namun, akses terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia termasuk pengetahuan, keterampilan, dan self-development masih terbatas, sehingga pemberdayaan belum sepenuhnya optimal dalam membangun kemandirian dan inovasi usaha tani (Selli et al., 2025).

C. Kesadaran Kritis

Menurut Lesnussa (2019), kesadaran kritis adalah kemampuan masyarakat menyadari bahwa kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami bukan semata-mata kehendak Tuhan atau takdir, melainkan akibat struktur sosial yang dapat diubah. Dalam konteks pemberdayaan Poktan, kesadaran kritis mengacu pada pemahaman petani terhadap kendala produksi pangan seperti banjir, hama, atau akses terbatas terhadap teknologi, dan kemampuan mereka untuk merespons secara kolektif dengan mencari solusi yang nyata. Kesadaran ini menjadi fondasi penting untuk memotivasi keterlibatan aktif serta inovasi lokal dalam mengoptimalkan ketahanan pangan desa.

Di Desa Kendalpecabean, para petani sebenarnya belum sepenuhnya memiliki kesadaran kritis yang mandiri, karena masih banyak bergantung pada arahan pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh program pemberdayaan sebelumnya yang lebih menekankan pada penyediaan sarana dan prasarana, tanpa diimbangi dengan penguatan soft skill, hard skill, dan pengembangan diri petani. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan seperti banjir yang menggenangi sawah, petani masih menunggu instruksi dari pemerintah desa dalam menentukan langkah penanganan. Berikut hasil dokumentasi lahan sawah yang tergenang banjir di Desa Kendalpecabean.



Gambar 2. Dokumentasi Lahan Sawah yang Tergenang Banjir di Desa Kendalpecabean (2024)

Sumber: Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean (2025)

Melihat dari gambar 2 di atas menunjukkan kondisi sawah milik salah satu warga di Dusun Kendaldoyong, Desa Kendalpecabean, yang tergenang banjir akibat luapan sungai pada musim hujan. Peristiwa ini terjadi saat intensitas curah hujan meningkat, sehingga aliran sungai meluap dan menggenangi lahan pertanian milik petani setempat. Kondisi tersebut mengganggu proses budidaya padi, baik pada masa tanam maupun menjelang panen, bahkan berpotensi besar menyebabkan gagal panen. Situasi ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa setempat karena dapat berdampak langsung pada pendapatan petani dan ketahanan pangan desa. Dalam menghadapi kondisi tersebut, penanganan masih bergantung pada arahan pemerintah desa karena kapasitas adaptasi petani belum sepenuhnya berkembang. Upaya yang dilakukan meliputi koordinasi kelompok tani, musyawarah desa, serta pengaturan sistem irigasi darurat untuk meminimalkan dampak banjir. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas terkait strategi tersebut, berikut hasil wawancara dengan Pak Subiyanto selaku Sekretaris Desa Kendalpecabean:

“Melihat sawah sampai gagal panen membuat kami sebagai pemerintah desa juga merasa gagal dalam melindungi petani. Kami sadar kalau ini bukan cuma soal nasib atau faktor alam, tapi juga karena saluran air dan sungai di sekitar sawah yang belum maksimal. Saat musim hujan, air sering meluap dan menggenangi lahan sampai tanaman rusak. Padahal, selama tiga tahun terakhir kami melihat cara tanam dan perawatan padi dari petani sudah sesuai standar, bahkan di desa sebelah hasil panennya bisa bertahan dan meningkat. Namun di Kendalpecabean justru menurun karena banjir. Ini jadi PR besar bagi kami, karena sebenarnya posisi sawah sudah cukup aman, tapi infrastrukturnya memang masih perlu diperbaiki, terutama di bagian sungai. Setelah musyawarah dengan petani, kami sepakat bahwa masalah ini harus ditangani bersama melalui perbaikan tepi sungai dan saluran air. Walaupun membutuhkan tenaga, anggaran, dan kerja sama banyak pihak, kami yakin dengan memanfaatkan sumber daya manusia, fisik, dan anggaran yang ada, masalah ini bisa segera ditangani supaya tidak terus berulang.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Dari hasil wawancara di atas, diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah desa dan kelompok tani mulai menyadari bahwa permasalahan gagal panen yang terjadi tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan konkret. Kesadaran tersebut mendorong adanya evaluasi terhadap kondisi sungai dan saluran air yang selama ini menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Melalui musyawarah dan koordinasi bersama, petani dan pemerintah desa kemudian sepakat untuk melakukan upaya perbaikan infrastruktur, khususnya melalui kegiatan normalisasi sungai. Langkah ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir dari sekadar menerima kondisi alam menjadi berupaya mencari solusi secara kolektif. Kesadaran yang disertai dengan tindakan nyata tersebut tercermin dalam keterlibatan petani dalam kegiatan perbaikan sungai sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan usaha pertanian.



Gambar 3. Dokumentasi Normalisasi Sungai di Desa Kendalpecabean (2024)

Sumber: Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean (2025)

Melihat Gambar 3 di atas, terlihat kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan di Desa Kendalpecabean sebagai upaya pencegahan banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Kegiatan ini dilaksanakan oleh petani dan warga setempat yang terlibat langsung dalam proses pembersihan serta perbaikan alur sungai. Normalisasi dilakukan di sepanjang sungai yang berada di sekitar lahan persawahan, khususnya di wilayah yang rawan terjadi luapan air. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan menjelang musim hujan dan menjelang masa panen untuk meminimalkan risiko genangan air di sawah. Pelaksanaan normalisasi sungai ini telah dilakukan secara rutin setiap tahun sejak tahun 2022 dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Dalam pelaksanaannya, warga yang terlibat memperoleh upah dari pemerintah desa, sehingga kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya mitigasi bencana, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Melalui keterlibatan bersama dalam kegiatan normalisasi sungai, terbangun pola kerja kolektif dan komunikasi yang intens antarpetani dan warga. Proses ini secara tidak langsung memperkuat rasa kebersamaan, sehingga para petani semakin menyadari pentingnya kekompakan dalam menjaga keberlangsungan pertanian. Hal ini disampaikan oleh Pak Mistar selaku Ketua Poktan Sidorukun II sebagai berikut:

“Kalau semua warga bisa kompak nanam bareng dalam waktu yang sama, hama tikus biasanya lebih gampang ditekan, jadi hasil panen juga bisa lebih rata. Sekarang kami juga mulai rajin nyatet jadwal tanam, perawatan, sampai panen, biar bisa saling berbagi pengalaman dan solusi antaranggota kelompok. Selain itu, dengan adanya kesadaran bersama, kami jadi lebih gampang ngatur giliran pakai pompa sama saluran irigasi supaya lebih efisien. Jadi intinya, kekompakan dan kebersamaan itu yang bikin kami bisa saling jaga, karena kalau jalan sendiri-sendiri pasti lebih berat.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, kekompakan dan kebersamaan antaranggota kelompok tani menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan pertanian. Dengan menanam secara serentak, mencatat jadwal tanam dan perawatan, serta berbagi pengalaman, anggota Poktan mampu mengendalikan hama, meningkatkan hasil panen, dan

mengoptimalkan penggunaan fasilitas seperti pompa dan saluran irigasi. Kesadaran tersebut belum sepenuhnya tumbuh secara mandiri, melainkan masih dipengaruhi oleh dorongan eksternal melalui pendampingan dan musyawarah. Meskipun kesadaran kritis petani di Desa Kendalpecabean belum sepenuhnya optimal, kondisi ini telah memicu berbagai tindakan nyata yang mendukung keberlanjutan usaha tani. Upaya seperti penanaman serentak, koordinasi pemanfaatan pompa, musyawarah perbaikan irigasi, serta pencatatan jadwal tanam menunjukkan bahwa petani mulai menerjemahkan kesadaran menjadi praktik kolektif.

Hal ini sejalan dengan teori Lesnussa (2019) yang menegaskan bahwa kesadaran kritis merupakan fondasi pemberdayaan masyarakat, serta didukung penelitian Alaia dan Darto (2024) tentang peran kesadaran kritis dalam meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Dengan demikian, penguatan kesadaran kritis, meskipun masih dibimbing, menjadi strategi penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus kesejahteraan petani (Sabeera et al., 2024).

D. Partisipasi

Menurut Lesnussa (2019), partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang dianggap penting bagi kelompok. Dalam konteks pemberdayaan kelompok tani, partisipasi mencakup keikutsertaan anggota dalam musyawarah, kegiatan sosialisasi, perencanaan tanam, pemeliharaan sawah, pengambilan keputusan terkait program pertanian, hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan arah dan keberhasilan program.

Di Desa Kendalpecabean, partisipasi petani terlihat melalui keikutsertaan dalam musyawarah rutin bersama pemerintah desa, kegiatan koordinasi sebelum musim tanam, serta sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, dinas pertanian, maupun pihak swasta. Kegiatan tersebut umumnya membahas permasalahan banjir, pengendalian hama, penentuan jadwal tanam, serta penyampaian informasi program bantuan dan pelatihan. Namun, keterlibatan petani dalam kegiatan tersebut belum merata, karena hanya sebagian anggota yang aktif mengikuti kegiatan secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, rata-rata jumlah anggota yang aktif mengikuti kegiatan kelompok berkisar antara 25–30 orang dari total 60 anggota Poktan, atau sekitar 42%–50%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota masih tergolong sedang dan belum mencerminkan keterlibatan penuh seluruh anggota. Sebagian petani cenderung hanya mengikuti kegiatan yang berkaitan langsung dengan bantuan atau hasil produksi, sementara partisipasi dalam perencanaan jangka panjang dan inovasi pertanian masih relatif rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Mistar selaku Ketua Poktan Sidorukun II sebagai berikut:

“Setiap ada musyawarah atau sosialisasi dari kecamatan, dinas, atau pihak luar, kami selalu mengundang semua anggota. Tapi yang rutin datang itu biasanya hanya sekitar setengahnya saja. Kalau kegiatannya berkaitan dengan bantuan atau pembagian bibit, yang hadir bisa lebih banyak. Kalau hanya rapat perencanaan, masih banyak anggota yang memilih tidak ikut.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Senada dengan hal tersebut, Pak Subiyanto selaku Sekretaris Desa Kendalpecabean menyampaikan:

“Kami terus mendorong warga untuk aktif ikut musyawarah dan memberikan masukan supaya program pertanian bisa tepat sasaran. Setiap ada pelatihan atau sosialisasi dari dinas maupun kecamatan, semua anggota Poktan selalu kami undang, meskipun yang hadir biasanya belum semuanya. Kami juga memfasilitasi koordinasi antar Poktan agar penanganan masalah hama dan banjir bisa lebih cepat dan efektif. Namun, sebagian petani masih menganggap rapat kurang penting dan lebih aktif jika kegiatannya berkaitan langsung dengan bantuan. Dengan koordinasi ini, kami berharap petani tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga terlibat dalam perencanaan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan desa.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kedua pernyataan narasumber menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kehadiran anggota dalam kegiatan perencanaan bukan disebabkan oleh kurangnya upaya pemerintah desa, melainkan masih dipengaruhi oleh orientasi petani pada manfaat jangka pendek, khususnya bantuan langsung. Selain itu, dapat diketahui bahwa partisipasi petani di Desa Kendalpecabean masih didominasi oleh keterlibatan dalam kegiatan formal, seperti musyawarah, koordinasi, dan sosialisasi program. Keterlibatan tersebut tidak hanya mendukung keberhasilan produksi, tetapi juga memperkuat kebersamaan antaranggota. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan musyawarah dan koordinasi petani di Desa Kendalpecabean yang mendukung keberhasilan produksi dan kebersamaan antaranggota.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Musyawarah Anggota Poktan Sidorukun Desa Kendalpecabean
Sumber: Diolah dari Poktan Desa Kendalpecabean (2025)

Melihat Gambar 4 sebelah kiri, tampak kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Kendalpecabean yang melibatkan pemerintah desa dan petani. Musyawarah ini membahas perencanaan program normalisasi sungai sebagai upaya mencegah banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen. Kegiatan tersebut dilakukan melalui diskusi dan penyusunan rencana perbaikan aliran sungai di sekitar lahan pertanian.

Sementara itu, Gambar 4 sebelah kanan menunjukkan musyawarah petani yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2024 di salah satu rumah warga Desa Kendalpecabean. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, Sekretaris Desa, penyuluh pertanian Kecamatan Candi, serta perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Musyawarah ini bertujuan membahas penurunan hasil panen akibat banjir dan serangan hama tikus. Melalui forum ini, petani menyampaikan keluhan secara langsung, kemudian bersama pemerintah desa merumuskan solusi berupa perbaikan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan pertanian untuk mencegah terjadinya gagal panen di masa mendatang.

Partisipasi petani di Desa Kendalpecabean sudah terlihat, tetapi keterlibatan mereka belum merata, sehingga peran aktif setiap anggota dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi petani masih didominasi oleh orientasi pada manfaat jangka pendek, sehingga keterlibatan dalam perencanaan jangka panjang dan inovasi pertanian masih terbatas. Temuan ini sejalan dengan teori Lesnussa (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan pangan, namun belum sepenuhnya terwujud di Desa Kendalpecabean. Hal ini juga didukung oleh penelitian Kristiani Nindi, dkk (2024) di Desa Kamubheka yang menekankan pentingnya keterlibatan anggota dalam pengelolaan pangan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi anggota Poktan Kendalpecabean masih perlu diperkuat melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan peran aktif pemerintah desa agar pemberdayaan kelompok tani dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan (Nindi et al., 2024).

E. Kontrol

Menurut Lesnussa (2019), kontrol dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia serta menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks kelompok tani (Poktan), kontrol mencakup keterlibatan aktif petani dalam mengambil keputusan terkait produksi, distribusi, serta penggunaan sumber daya pertanian. Kontrol yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal dan meminimalkan ketergantungan pada pihak eksternal, sehingga ketahanan pangan dapat lebih terjamin.

Di Desa Kendalpecabean, kontrol petani terhadap sumber daya pertanian masih terbatas. Pengambilan keputusan terkait penanaman, penggunaan bibit unggul, dan pemeliharaan sawah seringkali tergantung pada arahan pemerintah desa atau dinas pertanian. Meski ada struktur Poktan, keputusan strategis seperti pembagian bibit, penggunaan pupuk bersubsidi, dan jadwal panen masih menyesuaikan kebijakan dari pihak eksternal. Kendala lain adalah belum adanya SOP yang jelas terkait tata kelola Poktan, sehingga sebagian petani belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan lahan. Untuk lebih jelas melihat struktur organisasi dan pembagian tugas di masing-masing Poktan, berikut disajikan tabel nama pengurus beserta jabatan dan tupoksi mereka dalam mengelola kelompok tani.

Tabel 4. Dokumentasi Normalisasi Sungai di Desa Kendalpecabean

Poktan	Nama Pengurus	Jabatan	Tupoksi
Sidorukun I	Sutrisno	Ketua	Pengambilan keputusan, koordinasi, perwakilan kelompok, memimpin organisasi, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan.
Sidorukun I	Usman Afandi	Sekretaris	Administrasi dan pencatatan kelompok tani.
Sidorukun I	Abdul Kodir	Bendahara	Pencatatan dan pengelolaan keuangan.

Poktan	Nama Pengurus	Jabatan	Tupoksi
Sidorukun I	—	Koordinator	Promosi produksi pertanian, pemasaran, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.
Sidorukun II	Mistar	Ketua	Pengambilan keputusan, koordinasi, perwakilan kelompok, memimpin organisasi, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan.
Sidorukun II	Sulton	Sekretaris	Administrasi dan pencatatan kelompok tani.
Sidorukun II	Sri Warni	Bendahara	Pencatatan dan pengelolaan keuangan.
Sidorukun II	Sutrisno	Koordinator	Promosi produksi pertanian, pemasaran, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan.

Sumber : Diolah dari Pemerintah Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi (2025)

Tabel 4. di atas menunjukkan bahwa kedua Poktan, Sidorukun I dan II, mempunyai susunan organisasi yang sistematis beserta alokasi tanggung jawab yang spesifik. Ketua bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, koordinasi, dan kelancaran kegiatan kelompok. Sekretaris fokus pada administrasi dan pencatatan, bendahara mengelola keuangan, dan koordinator menangani promosi, pemasaran, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Struktur ini mencerminkan adanya peran yang terorganisir dalam pengelolaan Poktan, meskipun keputusan strategis terkait sumber daya besar masih bergantung pada pihak desa atau dinas pertanian. Berdasarkan struktur organisasi Poktan yang terstruktur, wawancara berikut menggali bagaimana kenyataannya anggota dan pengurus kelompok menjalankan peran mereka, terutama terkait pengambilan keputusan dan koordinasi dengan pihak eksternal. Berikut keterangan dari Pak Sutrisno selaku Ketua Poktan Sidorukun I:

“Kami sebenarnya sudah punya struktur organisasi yang jelas, tapi keputusan soal bantuan bibit atau pupuk masih datang dari desa dan dinas pertanian. Kami hanya menerima informasi dan menyesuaikan jadwal kegiatan. Kalau mau panen serentak, harus ada kesepakatan bersama, tapi keputusan awal tetap dari Poktan dan perangkat desa. Anggota biasanya mengikuti arahan itu karena memang belum terbiasa mengambil keputusan sendiri. Jadi koordinasi penting supaya semua berjalan lancar.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun Poktan memiliki struktur organisasi yang jelas, pengambilan keputusan utama terkait bantuan dan sumber daya masih dikendalikan oleh desa dan dinas pertanian. Anggota cenderung mengikuti arahan tersebut karena belum terbiasa membuat keputusan sendiri, sehingga kontrol mereka terhadap kegiatan Poktan bersifat terbatas. Namun, koordinasi internal tetap penting untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan kesepakatan bersama, seperti panen serentak, dapat terlaksana dengan baik. Berikut keterangan dari Pak Mistar selaku Ketua Poktan Sidorukun II:

“Kami rutin koordinasi di Poktan, termasuk mendata siapa saja anggota yang butuh bantuan. Kami memang mengurus administrasi dan anggaran, tapi soal penggunaan sumber daya besar masih dari desa. Tapi kami tetap bisa atur jadwal tanam dan bagi tugas sesuai kondisi anggota, jadi kontrol mereka tetap ada walau terbatas. Anggota juga kasih masukan soal hama atau irigasi, kadang kalau memungkinkan kami pakai idenya. Jadi, meski keputusan besar masih dikendalikan pihak luar, anggota tetap bisa ikut berperan dan keputusan yang diambil tetap sesuai kebutuhan sawah mereka.” (Wawancara, 20 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, meski keputusan besar soal sumber daya masih diatur desa, anggota Poktan tetap punya kontrol terbatas lewat pengaturan jadwal tanam, pembagian tugas, dan memberi masukan. Jadi, mereka masih bisa memengaruhi jalannya kegiatan sesuai kebutuhan sawah, meski belum sepenuhnya otonom.

Indikator kontrol dalam pemberdayaan Poktan di Desa Kendalpecabean mulai terlihat melalui struktur organisasi yang jelas dan mekanisme pengambilan keputusan secara partisipatif. Anggota Poktan Sidorukun I dan II terlibat aktif dalam perencanaan, pemeliharaan, dan panen sawah, serta berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk perbaikan infrastruktur yang mengurangi risiko gagal panen. Meskipun keputusan strategis besar masih dikendalikan pihak desa dan dinas pertanian, anggota tetap bisa memberi masukan dan menyesuaikan jadwal kegiatan, sehingga kontrol mereka terhadap aktivitas Poktan tetap terasa. Keterlibatan anggota juga mendorong koordinasi internal yang lebih efisien dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Nindi, dkk (2024), yang menunjukkan bahwa partisipasi anggota kelompok tani memperkuat ketahanan pangan, meskipun masih terdapat kendala transparansi dan keterbatasan fasilitas. Dengan demikian, pemberdayaan melalui peningkatan kontrol anggota tidak hanya mendorong produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat kemandirian dan keberlanjutan ketahanan pangan di tingkat desa (Nindi et al., 2024).

VI. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan Poktan Sidorukun di Desa Kendalpecabean melalui lima indikator Lesnussa (2019) menunjukkan capaian yang beragam. Pada indikator **kesejahteraan** menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi, pintu air, dan rumah pompa telah membantu petani di Desa Kendalpecabean mengurangi risiko gagal panen dan meningkatkan efisiensi produksi, meskipun hasil panen belum optimal. Integrasi program pemerintah desa dan kegiatan Poktan terbukti mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Pada indikator **akses**, petani di Desa Kendalpecabean memiliki akses memadai terhadap sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan, irigasi, dan rumah pompa, sehingga mendukung produktivitas dan keberlanjutan ekonomi lokal. Namun, akses terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia, seperti pengetahuan, keterampilan, dan self-development, masih terbatas. Indikator **kesadaran kritis**, petani di Desa Kendalpecabean belum sepenuhnya mandiri dan masih dipengaruhi dorongan eksternal, namun sudah memicu tindakan nyata seperti penanaman serentak, koordinasi pompa, perbaikan irigasi, dan pencatatan jadwal tanam yang menunjukkan penerjemahan kesadaran menjadi praktik kolektif. Pada indikator **partisipasi**, partisipasi petani di Desa Kendalpecabean sudah terlihat, namun hanya sebagian anggota yang aktif, sehingga keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang masih terbatas. Penguatan partisipasi melalui pendampingan dan peran aktif pemerintah desa diperlukan agar pemberdayaan kelompok tani lebih optimal dan berkelanjutan. Indikator terakhir, yaitu **kontrol**, menunjukkan bahwa meskipun Poktan memiliki struktur organisasi yang jelas, keputusan strategis terkait penggunaan sumber daya besar masih bergantung pada desa dan dinas pertanian. Meski demikian, anggota tetap memiliki ruang untuk mengatur jadwal tanam, pembagian tugas, dan memberi masukan, sehingga kontrol internal tetap berjalan meski belum penuh otonomi. Secara keseluruhan, pemberdayaan Kelompok Tani Sidorukun dalam meningkatkan ketahanan pangan di Desa Kendalpecabean telah dilaksanakan dengan capaian yang beragam. Pembangunan infrastruktur pertanian, pemanfaatan sarana dan prasarana, upaya kolektif melalui kesadaran kritis, serta koordinasi internal kelompok telah mendukung kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi, dan kontrol petani, meskipun beberapa aspek seperti pengembangan kapasitas sumber daya manusia, partisipasi merata, dan otonomi pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.

REFERENSI

- [1] I. Shobachiyah And I. U. Choiriyah, "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)," Pp. 1–15, 2024. Available: [Http://Dx.Doi.Org/10.21070/Ups.6198](http://Dx.Doi.Org/10.21070/Ups.6198)
- [2] K. F. Lermating, H. Aidore, And Paiki, "Ketersediaan Dan Aksesibilitas Pangan Lokal: Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya," *J. Adm. Terap.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 102–110, 2024.
- [3] A. Mulyasara And T. Anti, "Dinamika Komunikasi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sumber Rezeki Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Di Desa Bungaraya Kabupaten Siak," *J. Environ. Geogr. Educ.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 99–113, 2024, Doi: 10.61511/Jegeo.V1i2.2024.1119.
- [4] R. Khasanah, S. Suminah, And E. Widiyanti, "Partisipasi Anggota Kelompok Wanita Tani (Kwt) Dalam Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Kabupaten Klaten," *J. Integr. Agric. Socio-Economics Entrep. Res.*, Vol. 2, No. 2, P. 92, 2024, Doi: 10.26714/Jiasee.2.2.2024.92-100.
- [5] Bpk.Go.Id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Vol. 227, No. 5360 (Tambahan Lembaran Negara). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia, 2012. [Online]. Available: [Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39100](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/39100)
- [6] V. V Rumawas, H. Nayoan, And N. Kumayas, "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)," *J. Gov.*, Vol. 1, No. 1, Pp. 1–12, 2021.
- [7] A. J. Fernanda And I. F. Agustina, "Implementation Of A Food Security Program In Permisan Village , Jabon District [Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Permisan Kecamatan Jabon]," Pp. 1–10, 2025.
- [8] R. D. Tama And E. Priyanti, "Efektivitas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Dalam Upaya Ketahanan Pangan Keluarga Di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang Tahun 2021," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, Vol. 8, No. 20, Pp. 282–289, 2022, [Online]. Available: [Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7242932](https://doi.org/10.5281/Zenodo.7242932)
- [9] P. N. Chasan And I. U. Choiriyah, "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pada Program Ketahanan Pangan Di Wisata Buah," Pp. 1–12, 2024.
- [10] F. Meo, F. B. Tokan, And S. Rodriques, "Pemberdayaan Kelompok Petani Sorgum Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Desa Lamabelawa, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur," *J. Cakrawala Ilm.*, Vol. 3, No. 4, Pp. 987–1007, 2023.
- [11] Demakkab.Go.Id, "Pemantauan Lapangan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah," Dinas Komunikasi Dan

- Informatika Kabupaten Demak, Aug. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.demakkab.go.id/news/pemantauan-lapangan-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah>
- [12] I. Fadilah, "70 Ribu Ha Lahan Pertanian Hilang Setiap Tahun, Kementan Cetak Sawah Baru," *Detiksumut*, Detikcom, 2024. [Online]. Available: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7569307/70-ribu-ha-lahan-pertanian-hilang-setiap-tahun-kementan-cetak-sawah-baru>
 - [13] Bpk.Go.Id, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Pemerintah Republik Indonesia, 2009. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/details/38786/Uu-No-41-Tahun-2009>
 - [14] D. R. Ramadhani And N. Safira, "Ketahanan Pangan Indonesia: Dari Kecukupan Menuju Kedaulatan," Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb), Kementerian Keuangan RI, 2025. [Online]. Available: <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/data/847-Berita/Opini/4542-Ketahanan-Pangan-Indonesia-Dari-Kecukupan-Menju-Kedaulatan.html>
 - [15] Kementerian Pekerjaan Umum, "Upaya Menjaga Ketahanan Pangan Indonesia." Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Oct. 12, 2023. [Online]. Available: <https://sda.pu.go.id/balai/bwssumatera1/article/upaya-menjaga-ketahanan-pangan-indonesia>
 - [16] A. Nefi, "Sumbang 12 Persen Untuk Pdb, Pertanian Jadi Tulang Punggung Perekonomian Indonesia," *Tempo.Co*, May 06, 2025. [Online]. Available: <https://www.tempo.co/ekonomi/sumbang-12-persen-untuk-pdb-pertanian-jadi-tulang-punggung-perekonomian-indonesia-1345313>
 - [17] Idn Financials, "Ekspor Industri Manufaktur Naik 24 Persen," *Idn Financials*, Idn Financials, 2022. [Online]. Available: <https://www.idnfinancials.com/archive/id/news/44352/manufacturing-industry-exports-up-24-percent>
 - [18] Idn Financials, "Economy Grows 5.03% In 2024, Here Are The Key Supporting Sectors!," Idn Financials, 2025. [Online]. Available: <https://www.idnfinancials.com/news/52315/economy-grows-5.03-in-2024-here-are-the-key-supporting-sectors>
 - [19] Bps, "Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh Di Tengah Ketidakpastian Global," Badan Pusat Statistik (Bps), May 05, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/05/703/ekonomi-indonesia-tetap-tumbuh-di-tengah-ketidakpastian-global.html>
 - [20] H. K. Mirta, "Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Padi (Studi Kasus Kelompok Tani Sumber Rejeki Di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang)," Vol. 183, No. 2, Pp. 153–164, 2023.
 - [21] W. Wakerkwa, D. Daryanto, And A. K. Dianto, "Peran Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dalam Pemberdayaan Petani Di Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik," *J. Agribisnis Wijaya Putra Surabaya Agriwitas*, Vol. 1, No. 01, Pp. 43–48, 2022, Doi: 10.38156/Agriwitas.V1i01.5.
 - [22] I. Mutmainna, L. Hakim, And D. Saleh, "Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng," *J. Adm. Publik*, Vol. 2, Pp. 269–283, 2020.
 - [23] D. Ariyanti And H. Sukmana, "Implementasi Ketahanan Pangan (Studi Kasus Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) Implementation Of Food Security (Case Study Of Tropodo Village , Krian Subdistrict Sidoarjo Regency) Mengingat Jumlah Penduduk Indonesia Yang Sangat Besar Dan," *J. Balitbangda Lampungprov*, Vol. 12, No. 1, Pp. 83–96, 2024.
 - [24] A. L. Sabeera, D. Miradhia, And U. Padjadjaran, "Pemberdayaan Kelompok Tani (Poktan) Di Desa Ciwangi," *Jambura J. Community Empower.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 247–261, 2024.
 - [25] D. I. S. Simatupang, "Peranan Kelompok Tani Dalam Mendukung Ketahanan Pangan," *J. Ilm. Skylandsea*, Vol. 2 No., No. Issn: 2614-5154, Pp. 64–67, 2018.
 - [26] H. Herianto, N. Wathoni, And S. Maryati, "Peran Kelompok Tani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tani Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur," *J. Green Growth Dan Manaj. Lingkung.*, Vol. 14, No. 2, Pp. 176–203, 2025, Doi: 10.21009/Jgg.142.06.
 - [27] M. Rosidin, D. Sumpena, And A. Aliyudin, "Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Memiliki Peran Dalam Memajukan Ekonomi Masyarakat," *Tamkin J. Pengemb. Masy. Islam*, Vol. 7, No. 1, Pp. 75–92, 2023, Doi: 10.15575/Tamkin.V7i1.24414.
 - [28] Ramli, "Pemberdayaan Kelompok Tani Pada Usaha Tani Bawangmerah Di Desa Bambapuang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang," Vol. 3, No. 32, Pp. 1–44, 2018.
 - [29] P. A. Wijaya, D. P. Darmawan, And A. A. . W. S. Djelantik, "Kinerja Kelompok Tani Pada Gapoktan Tunjung Mekar Dalam Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Puap) Pada Desa Macang Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem," *J. Agribisnis Dan Agrowisata (Journal Agribus. Agritourism)*, Vol. 11, No. 1, P. 25, 2022, Doi: 10.24843/Jaa.2022.V11.I01.P03.
 - [30] W. J. Kapoh, D. M. Liando, And J. Rares, "Pemberdayaan Aparatur Di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado," *J. Ilm. Soc.*, Vol. 1, No. 24, Pp. 105–112, 2022.
 - [31] N. R. K. V. Y. Londa And D. L. Tampongangoy, "Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Tolombukan

- Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,” *J. Adm. Publik Unsrat*, Vol. 3, No. 046, 2021.
- [32] F. Yudha And A. S. Kurniawan, “Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) Karangmangu Dalam Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Di Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi,” *Tamkin J. Pengemb. Masyarakat Islam*, Vol. 2, No. 1, Pp. 48–57, 2022.
- [33] Selli, H. R. Cristya, And A. Afrizal, “Pemberdayaan Petani Padi Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Desa Sungai Dua Indah,” *Var. Res. J.*, Vol. 02, No. 02, Pp. 534–533, 2025.
- [34] Syariani Br Tambunan And Muhammad Yassir, “Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Penghidupan: Pemberdayaan Petani Kecil Melalui Praktik Pertanian Tahan Iklim Dan Strategi Akses Pasar,” *J. Penelit. Progresif*, Vol. 2, No. 2, Pp. 11–18, 2023, Doi: 10.61992/Jpp.V2i2.75.
- [35] Sukma Sulistya Aji, “Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Program Kawasan Ekonomi Masyarakat Oleh Dinas Pertanian Kota Semarang,” 2020.
- [36] K. Nindi, M. R. Pellokila, And F. W. Ballo, “Peran Kelompok Tani Dalam Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Lumbung Pangan Desa Kamubheka Kecamatan Maukaro Kabupaten Ende),” *J. Bus. Financ. Econ.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 1–12, 2024, [Online]. Available: <https://Journal.Univetbantara.Ac.Id/Index.Php/Jbfe>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.